

TUGAS PROJECT BASED GROUP

Mata Kuliah: Organisasi Internasional dan Globalisasi

Climate Issues during Global Governance (Isu Perubahan Iklim dalam Tata Kelola Global): Peran Global Governance dalam Mengatasi Isu Perubahan Iklim



Disusun Oleh:

Azzahra Risqi Andania

2316041100

Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

2026/2027

Abstract

Climate change has become one of the greatest global challenges of the 21st century. Its impacts are felt across national borders, affecting environmental sustainability, economic stability, food security, and human welfare. Since climate change cannot be addressed by a single country alone, global governance has become an essential mechanism for coordinating international efforts. This paper examines the relationship between climate change and global governance, highlighting the roles of international organizations, states, non-governmental organizations (NGOs), and the private sector. It also discusses the challenges facing global climate governance and proposes strategies to improve international cooperation.

Keywords: Climate Change, Global Governance, International Cooperation, Sustainability, United Nations.

Abstrak

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global terbesar yang dihadapi dunia pada abad ke-21. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu negara, tetapi juga memengaruhi seluruh masyarakat internasional melalui peningkatan suhu bumi, naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrem, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan iklim tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan membutuhkan kerja sama internasional melalui mekanisme *global governance* (tata kelola global). Paper ini bertujuan untuk menjelaskan peran global governance dalam menangani isu perubahan iklim, aktor-aktor yang terlibat, berbagai tantangan yang dihadapi, serta posisi Indonesia dalam upaya penanganan perubahan iklim di tingkat global. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai literatur ilmiah, buku, jurnal, dan dokumen organisasi internasional.

Kata Kunci: Perubahan Iklim, Global Governance, Kerja Sama Internasional, Tata Kelola Global, Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim (*climate change*) merupakan isu global yang semakin mendapat perhatian masyarakat internasional. Aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, industrialisasi, dan peningkatan emisi gas rumah kaca telah menyebabkan kenaikan suhu bumi secara signifikan. Dampak dari perubahan iklim tidak hanya berupa meningkatnya suhu global, tetapi juga memicu berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, badai tropis, dan kenaikan permukaan laut.

Permasalahan tersebut bersifat lintas negara (*transboundary issues*), sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan nasional. Dibutuhkan kerja sama antarnegara serta keterlibatan berbagai aktor internasional untuk menciptakan kebijakan yang efektif dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

Konsep *global governance* hadir sebagai mekanisme yang memungkinkan negara-negara bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan global. Melalui organisasi internasional, perjanjian internasional, lembaga keuangan, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil, berbagai kebijakan dan komitmen bersama dibentuk untuk mengurangi emisi karbon dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan global governance?
2. Mengapa perubahan iklim menjadi isu dalam global governance?
3. Bagaimana peran organisasi internasional dalam menangani perubahan iklim?
4. Apa saja tantangan global governance dalam mengatasi perubahan iklim?
5. Bagaimana posisi Indonesia dalam tata kelola perubahan iklim global?

1.3 Tujuan Penulisan

Paper ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan konsep global governance.
 2. Menganalisis perubahan iklim sebagai isu global.
 3. Mendeskripsikan peran organisasi internasional dalam penanganan perubahan iklim.
 4. Mengidentifikasi tantangan global governance terhadap perubahan iklim.
 5. Menjelaskan kontribusi Indonesia dalam upaya penanganan perubahan iklim dunia.
-

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Global Governance

Global governance atau tata kelola global merupakan proses pengelolaan berbagai persoalan internasional melalui kerja sama antarnegara maupun aktor non-negara. Tidak seperti pemerintahan suatu negara yang memiliki otoritas penuh, global governance berjalan melalui kesepakatan, perundingan, dan kerja sama internasional.

Dalam global governance terdapat beberapa aktor penting, yaitu:

- Negara
- Organisasi internasional
- Organisasi non-pemerintah (NGO)
- Perusahaan multinasional
- Akademisi
- Masyarakat sipil

Seluruh aktor tersebut memiliki peran dalam menciptakan solusi terhadap berbagai persoalan global seperti kemiskinan, pandemi, keamanan internasional, dan perubahan iklim.

2.2 Perubahan Iklim sebagai Isu Global Governance

Perubahan iklim dikategorikan sebagai *global public issue* karena dampaknya dirasakan oleh seluruh negara. Emisi karbon yang dihasilkan oleh suatu negara dapat memengaruhi kondisi iklim dunia secara keseluruhan.

Beberapa dampak perubahan iklim antara lain:

- meningkatnya suhu rata-rata bumi;
- mencairnya es di kutub;
- naiknya permukaan air laut;
- meningkatnya frekuensi bencana alam;
- terganggunya ketahanan pangan;
- berkurangnya keanekaragaman hayati; dan
- meningkatnya risiko kesehatan masyarakat.

Karena dampaknya bersifat global, diperlukan koordinasi internasional agar seluruh negara memiliki komitmen dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

2.3 Peran Organisasi Internasional

a. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PBB menjadi organisasi internasional utama yang memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam menghadapi perubahan iklim. Berbagai konferensi iklim dunia diselenggarakan untuk menghasilkan kesepakatan bersama.

b. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

UNFCCC dibentuk pada tahun 1992 sebagai dasar kerja sama internasional dalam mengatasi perubahan iklim.

Tujuan utama UNFCCC adalah:

- menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca;
- mendukung pembangunan berkelanjutan; dan
- membantu negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

c. Paris Agreement

Perjanjian Paris tahun 2015 menjadi salah satu tonggak penting dalam tata kelola perubahan iklim global.

Beberapa tujuan utama Perjanjian Paris meliputi:

- membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C;
- mengupayakan pembatasan hingga 1,5°C;
- meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- mendorong pendanaan iklim bagi negara berkembang.

2.4 Peran Aktor Non-Negara

Selain pemerintah, berbagai aktor non-negara juga berperan penting dalam global governance.

Organisasi Non-Pemerintah (NGO)

NGO berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan melalui kampanye, penelitian, dan advokasi kebijakan.

Sektor Swasta

Perusahaan mulai menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, dan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Masyarakat

Masyarakat dapat berkontribusi melalui gaya hidup ramah lingkungan, pengurangan penggunaan plastik, penghematan energi, serta partisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan.

2.5 Tantangan Global Governance dalam Mengatasi Perubahan Iklim

Walaupun telah terdapat berbagai kerja sama internasional, implementasi kebijakan perubahan iklim masih menghadapi berbagai kendala.

1. Perbedaan Kepentingan Negara

Negara maju dan negara berkembang memiliki kepentingan yang berbeda. Negara berkembang masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi sehingga pengurangan emisi sering dianggap dapat menghambat pembangunan.

2. Pendanaan Iklim

Banyak negara berkembang mengalami keterbatasan dana dalam melakukan transisi menuju energi bersih.

3. Lemahnya Mekanisme Penegakan

Sebagian besar perjanjian internasional tidak memiliki mekanisme sanksi yang kuat sehingga pelaksanaannya bergantung pada komitmen masing-masing negara.

4. Perkembangan Teknologi

Tidak semua negara memiliki kemampuan teknologi untuk mengembangkan energi bersih maupun teknologi rendah karbon.

2.6 Posisi Indonesia dalam Global Governance Perubahan Iklim

Indonesia memiliki posisi strategis dalam isu perubahan iklim karena merupakan negara dengan hutan tropis terbesar di dunia dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

- berpartisipasi dalam Perjanjian Paris;
- menyusun Nationally Determined Contribution (NDC);
- mengembangkan energi baru terbarukan;
- mengurangi deforestasi;
- melakukan rehabilitasi hutan dan lahan; serta
- menargetkan pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Indonesia juga aktif dalam berbagai forum internasional mengenai perubahan iklim serta mendorong kerja sama regional dalam pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola global karena dampaknya melintasi batas negara dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Melalui konsep global governance, negara-negara dapat bekerja sama dalam menyusun kebijakan, melakukan negosiasi, serta membangun komitmen bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Keberhasilan penanganan perubahan iklim bergantung pada komitmen seluruh aktor global, baik pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, maupun masyarakat sipil. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan seperti perbedaan kepentingan negara, keterbatasan pendanaan, dan lemahnya mekanisme penegakan, kerja sama internasional tetap menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki peran penting dalam mendukung agenda global melalui berbagai kebijakan dan komitmen terhadap pengurangan emisi serta perlindungan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Biermann, F. (2014). *Earth System Governance: World Politics in the Anthropocene*. MIT Press.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*.

Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2016). "Cooperation and Discord in Global Climate Policy." *Nature Climate Change*, 6(6), 570–575.

Rosenau, J. N. (1995). "Governance in the Twenty-First Century." *Global Governance*, 1(1), 13–43.

United Nations. (2015). *Paris Agreement*.

United Nations Framework Convention on Climate Change. (1992). *United Nations Framework Convention on Climate Change*.